



Kendala Pelaksanaan Manajemen Hubungan Masyarakat di Sekolah

Ericha Yunia Putri Daulay

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
ericaputry23@gmail.com

Nunu Mahnun

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
nunu.mahnun@uin-suska.ac.id

Muhammad Amin

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau, Indonesia
muhammadamin@stai-alkifayahriau.ac.id

Abstract

This study aims to determine the obstacles to implementing public relations management in schools. This research uses a case study approach at one of the vocational schools in Riau namely the Riau Tax Vocational High School (SMK). The research informants were the Head of the School, the Deputy Head of Public Relations, and the Head of the Department at the Riau Taxation Vocational School. This study found that the implementation of public relations management at the Riau Tax Vocational School has been running as it should. This was proven by the existence of school partnerships with several existing agencies to make public relations programs successful. In addition, communication has also been good through meetings with parents of students to convey the progress of students both academic and non-academic, meetings with committees to strengthen cooperative relations, and meetings with school partners to coordinate cooperation. Meanwhile, regarding the implementation of public relations on the aspect of the school's image, it was quite good with the facilitation of the development of student's interests and talents in extracurricular activities. Other results found that schools experienced problems in carrying out their activities: 1) Lack of parental participation, 2) Limited school operational funds, and 3) Schools were not ready to face the times for the curriculum synchronization process. This has implications for the smooth implementation of public relations and of course, if the school does not immediately anticipate it will affect the image and quality of the school going forward.

Keywords: Obstacles, Implementation, Public Relation Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pelaksanaan manajemen humas di Sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada salah satu sekolah kejuruan yang ada di Pekanbaru yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perpajakan Riau. Adapun informan penelitian yaitu Kepala Sekolah, Waka Humas dan Kepala

Jurusan di SMK Perpajakan Riau. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan manajemen hubungan masyarakat di SMK Perpajakan Riau sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan adanya kerjasama kemitraan sekolah bersama beberapa instansi yang ada untuk menyukseskan program-program humas. Selain itu komunikasi yang terjalin juga sudah baik melalui pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk menyampaikan progress peserta didik baik akademik maupun non akademik, pertemuan dengan komite untuk mempererat hubungan kerjasama, dan pertemuan dengan mitra sekolah untuk koordinasi kerjasama. Sedangkan terkait pelaksanaan hubungan masyarakat pada aspek citra Sekolah sudah cukup baik dengan adanya fasilitasi bagi pengembangan minat dan bakat peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler. Hasil lain menemukan bahwa sekolah mengalami kendala dalam menjalankan kegiatannya, yaitu: 1) Kurangnya partisipasi orang tua, 2) Terbatasnya dana operasional sekolah, dan 3) Belum siapnya sekolah menghadapi perkembangan zaman untuk proses sinkronisasi kurikulum. Hal tersebut berimplikasi pada kelancaran pelaksanaan kehumasan dan tentu jika sekolah tidak segera mengantisipasinya akan berpengaruh pada image dan mutu sekolah ke depan.

Kata kunci: Problematika, Manajemen Hubungan Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satu yang menjadi faktor terpenting sebuah lembaga pendidikan berhasil dalam menjalankan tugas dan perannya adalah adanya kemampuan lembaga pendidikan dalam membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan dan lingkungan atau masyarakat. Lembaga pendidikan juga harus berusaha menciptakan citra yang baik untuk masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus membentuk divisi humas atau yang sering disebut hubungan masyarakat.

Hubungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu lembaga organisasi termasuk lembaga pendidikan. Peran hubungan masyarakat menjadi sangat penting untuk membangun hubungan baik dan kesepahaman antara lembaga pendidikan dan masyarakat, salah satunya dilakukan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan, penerimaan saran dan kritikan, dan hal lain yang berkaitan dengan proses komunikasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, untuk menghubungkan kepentingan kedua belah pihak dibutuhkan satu bidang khusus yang mengelola aktifitas hubungan masyarakat dengan baik, secara profesional, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Untuk mengelola aktifitas hubungan masyarakat sering disebut juga dengan manajemen hubungan masyarakat (Juhji, et. al, 2020).

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaiknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Untuk menciptakan hubungan baik dengan mitra kerja, maka pihak sekolah harus mengoptimalkan peran serta humas.

Humas sekolah bertugas menangani kebutuhan program-program yang sudah dirancang untuk meningkatkan mutu sekolah. Humas sekolah bertanggung jawab tidak hanya memperlancar program-program kehumasan tetapi juga memastikan bahwa program humasan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sekolah, siswa, dan mitra kerja tentunya. Divisi humas terdapat di beberapa institusi pendidikan, dari mulai SMP, SMA, dan SMK. Divisi Humas pada SMK menjadi sangat penting untuk menjembatani sekolah dengan mitra kerja.

SMK sebagai salah satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya agar siap bekerja. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, didefinisikan bahwa: pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, yang lebih spesifik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, yang menyebutkan target Pendidikan Menengah yaitu: Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu, karenanya pendidikan kejuruan harus dekat dengan dunia kerja. Pengertian tersebut mengandung pesan bahwa setiap institusi yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan harus berkomitmen menjadikan tamatannya mampu bekerja dalam bidang tertentu. Yaitu, bahwa Sekolah Menengah Kejuruan tidak hanya menyelenggarakan pembelajaran saja, namun juga harus mampu menciptakan lulusan yang dibutuhkan sesuai dengan dunia kerja (Jaya, 2013).

Untuk menciptakan lulusan yang di butuhkan di dunia kerja tentu saja lembaga pendidikan harus mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan seperti mempersiapkan mitra kerja sebagai pendukung peserta didik dalam mengasah kemampuan yang

dimilikinya. Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa syarat utama dalam pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan adalah adanya kemitraan/kerja sama dengan pihak luar dalam hal ini masyarakat, dunia usaha/industri.

Kinanti dalam jurnal Virgiawan Listiyanto berpendapat bahwa kemitraan yang diselenggarakan di sekolah dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Humas sekolah bertugas untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal agar menciptakan kemitraan antar sekolah, ataupun dengan lembaga lainnya, yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri.³

Implementasi humas berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMK Perpajakan Riau, masih ditemukan gejala-gejala terkait implementasi hubungan masyarakat di SMK Perpajakan Riau sebagai berikut: 1. Kurangnya komunikasi dengan orang tua. 2. Kurangnya fasilitas yang di sediakan sekolah untuk menunjang kegiatan di sekolah. 3. Kerja sama dengan IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Kerja) yang kurang maksimal. Dengan demikian study ini bertujuan menemukan bagaimana pelaksanaan hubungan masyarakat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hubungan masyarakat di SMK Perbangkan Riau.

B. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan jenis pendekatan study kasus. Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perpajakan Riau. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada kepala sekolah, waka humas sekolah, dan kepala jurusan. Data dianalisis menggunakan tematik analisis. Adapun tahapan analisis yang dilakukan yaitu Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Selanjutnya keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas)

Manajemen humas di sekolah SMK Perpajakan Riau menjalankan kegiatan atau program humas sudah berjalan sebagaimana mestinya melalui tahapan dan fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC). Proses pelaksanaan hubungan masyarakat juga sudah dilakukan melalui komunikasi yang baik kepada seluruh pihak yang terkait. Kegiatan itu dilakukan untuk kegiatan demi mendukung berkembangnya sebuah sekolah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai program kehumasan di SMK Perpajakan Riau yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi berikut ini:

a. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL)

SMK Perpajakan Riau sudah memiliki 10 mitra kerja untuk menyelenggarakan program kerja lapangan. Manajemen humas dalam pelaksanaan Praktik Keja Lapangan (PKL) meliputi:

1) Tahap perencanaan PKL

Pada tahap perencanaan ini Waka Humas dan Kepala Kompetensi Jurusan akan melakukan pendataan peserta PKL, mengirim surat permohonan kepada mitra sekolah untuk pengadaan PKL, pemetaan siswa PKL, dan mempersiapkan jadwal pelaksanaan PKL.

2) Tahap Pelaksanaan PKL

Pelaksanaan PKL di SMK Perpajakan Riau dilaksanakan pada kelas XII selama 3 bulan. Pada tahapan ini peserta didik melaksanakan PKL dengan bekal ilmu pengetahuan yang di dapat selama belajar di sekolah. Selama berjalannya kegiatan PKL peserta didik diberikan sepenuhnya kepada mitra sekolah dan harus mentaati peraturan yang ada ditempat tersebut.

3) Tahap Pengawasan PKL

Tahap pengawasan dilakukan oleh pembimbing. Pembimbing bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi saat pelaksanaan PKL. Pembimbing ini terdapat 2 jenis, yaitu pembimbing dari sekolah yang merupakan kepala kompetensi jurusan dan pembimbing lapangan yang di tunjuk oleh pihak dunia usaha dan industri. Tugas pembimbing ini mengontrol jalannya kegiatan PKL, dan mencari masukan dari mitra sekolah.

b. Kunjungan Industri (KI)

Kunjungan industri merupakan kegiatan kunjungan siswa dan guru ke dunia kerja untuk mengetahui cara kerja operasional perusahaan. Kunjungan industri ini dilaksanakan satu kali selama 3 tahun yaitu pada siswa kelas XI. Tujuan diadakannya kegiatan kunjungan industri ini adalah agar siswa dapat memahami kondisi dunia usaha/industri mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada secara nyata yang nantinya akan berguna untuk pengalaman melakukan PKL. Dalam kegiatan ini juga siswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan atau teori yang dipelajarinya selama belajar disekolah. Dalam pelaksanaan kunjungan industri SMK Perpajakan Riau memiliki tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan kunjungan industri, yaitu:

1) Perencanaan Kunjungan Industri

Pada tahap perencanaan ini sekolah melakukan pendataan pihak IDUK yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jurusan yang ada disekolah. Setelah melakukan pendataan sekolah akan mengirimkan surat permohonan kunjungan industri. Yang terakhir yaitu mendata guru pendamping, biasanya yang menjadi pendamping adalah ketua kompetensi jurusan setiap jurusan.

2) Pelaksanaan Kunjungan Industri. Pelaksanaan kunjungan industri ini dilakukan selama 2 bulan sekali.

3) Pengawasan Kunjungan Industri

Setelah semua tahapan persiapan data sudah, selanjutnya adalah pengondisian terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan KI. yang pertama adalah pihak internal sekolah yaitu melibatkan guru dan siswa, guru sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan. Kemudian pengondisian pihak eksternal sekolah yaitu orang tua/wali dari siswa dan juga pihak Usaha/industri. Terkhusus untuk pengondisian orang tua adalah terkait perizinan dan juga pembiayaan dalam pelaksanaan KI tersebut. Sedangkan untuk pihak usaha/industri adalah pengkondisian tentang tempat dan waktu pelaksanaan juga mensinkronkan antara program dari sekolah dengan teknis lapangan yang akan dilakukan.

c. Mendatangkan guru tamu

Kegiatan mendatangkan guru tamu ialah dengan cara mendatangkan dan mengundang tenaga-tenaga ahli yang kompeten dalam bidangnya guna memberi gambaran tentang profil perusahaan, membantu menerapkan proses pembelajaran di sekolah agar sesuai dengan kebutuhan industri dan memberikan materi pembelajaran langsung kepada siswa. Kegiatan ini dilakukan 2 bulan sekali.

1) Perencanaan Guru Tamu

Perencanaan pengadaan guru tamu ini akan dimulai dengan mempersiapkan kelas mana yang akan menerima guru tamu, permohonan pengadaan guru tamu dengan mitra sekolah dan guru tamu mempersiapkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber.

2) Pelaksanaan Guru Tamu

Pada tahap ini sekolah mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan, narasumber memberikan materi terkait yang sesuai dengan jurusan, dan narasumber menjelaskan kegiatan yang dilakukan di dunia kerja yang dialami. Jika keadaan memungkinkan dan sarana prasarana memadai guru tamu akan membimbing peserta didik untuk melakukan praktikum.

3) Pengawasan

Pengawasan ini dalam bentuk evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan selesai dengan melakukan sesi tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan oleh narasumber atau guru tamu.

d. Penyelarasan Kurikulum

Penyelarasan kurikulum atau sinkronisasi kurikulum ini dilakukan dengan tujuan agar tercapainya kesesuaian kompetensi yang ada di IDUK dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Sekolah vokasi harus dapat mengembangkan kurikulum secara mandiri sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan adanya sinkronisasi kurikulum ini diharapkan Kompetensi Keahlian SMK Perpajakan Riau mampu menyelaraskan kurikulum dengan IDUK sehingga

diharapkan para lulusannya siap terjun langsung ke dunia kerja. Manajemen humas sekolah SMK Perpajakan sudah menerapkan manajemen dalam melakukan kegiatan kehumasan yang ada disekolah. Hal ini sesuai dengan tugas pokok humas untuk mengkoordinasi dalam pelaksanaan program humas.

2. Kendala Pelaksanaan Manajemen Hubungan Masyarakat

Sekolah Menengah Kejuruan Perpajakan Riau tetap menjaga hubungan yang baik dengan pihak eksternal maupun internal dengan membangun komunikasi dengan diadakannya pertemuan dengan *stakeholder* untuk membahas mengenai program yang akan dilakukan, pertemuan dengan seluruh orang tua siswa untuk membahas mengenai perkembangan akademis maupun non-akademis siswa, pertemuan dengan komite sekolah untuk mempererat kerjasama, dan pertemuan dengan mitra sekolah untuk mempererat hubungan kerjasama dan melakukan koordinasi. Pertemuan tersebut dilaksanakan dengan waktu tertentu yang sudah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan agar informasi yang ada di sekolah tersampaikan dengan baik kepada pihak eksternal maupun pihak internal.

Komunikasi dan penyampaian informasi juga terkadang dilakukan melalui media komunikasi seperti WhatsApp, Facebook, Web, dan Instagram. Sekolah mengelola media sosial sebaik mungkin untuk menyampaikan informasi terkait keadaan di sekolah. Sekolah SMK Perpajakan juga memiliki website mengenai profil sekolah yang dapat diakses gratis untuk memberikan informasi dan menarik minat kepada masyarakat tentang sekolah SMK Perpajakan Riau.

Dalam melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi tersebut, humas sekolah ada mengalami masalah atau hambatan. Hambatan yang di hadapi sekolah adalah mengenai partisipasi orang tua dan masyarakat. Orang tua peserta didik masih kurang peduli terhadap masalah peserta didik dan sekolah. Hal ini bertentangan dengan pendapat Mulyasa dalam buku Abdul Rahmad, Manajemen Humas di Sekolah, bahwa salah satu kunci sukses manajemen dalam menarik partisipasi orang tua adalah menjalin hubungan yang harmonis (Rahmad, 2016). Humas merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang memiliki peran menyambungkan komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat guna mencapai tujuan pendidikan yang bermutu dengan menumbuhkan motivasi dan partisipasi public agar menciptakan pendapat atau opini yang menguntungkan bagi sekolah.

Sekolah telah berupaya mengatasi hambatan tersebut, dengan bersikap transparan terutama dalam hal keuangan. Sekolah melibatkan orang tua peserta didik dalam pembahasan dan pengambilan keputusan tentang rencana program sekolah. Sekolah beranggapan bahwa dengan demikian, maka orang tua peserta didik akan merasa ikut memiliki sekolah karna secara tidak langsung mereka merasa di hargai sebagai orang tua peserta didik serta dalam berkomunikasi

dengan orang tua peserta didik menggunakan Bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh berbagai kalangan sehingga terciptanya komunikasi yang baik.

Sekolah memiliki faktor penghambat lain dalam pelaksanaan hubungan masyarakat yaitu terkait membangun citra sekolah. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas ekstrakurikuler sekolah. Sekolah tidak memiliki lapangan untuk ekstrakurikuler voli dan futsal. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang SISDIKNAS yang menyatakan bahwa sekolah sebagai wadah dan sarana untuk mengembangkan bakat serta kemampuan peserta didik, sekolah juga harus mampu memfasilitasi kegiatan yang ada, juga peraturan pemerintah RI Bab V Pasal 12 Ayat 1b, yaitu: "Setiap peserta didik pada tiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuannya."

Sebaiknya sekolah mengatasi ini segera karena sebagaimana teori manajemen mengatakan bahwa pengembangan citra merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pemasaran. Strategi pencitraan adalah sebuah upaya yang tidak datang tiba-tiba dan tidak dapat direkayasa melainkan citra hanya bisa didapat (Anggoro, 2008). Membangun citra positif merupakan tujuan utama humas yang harus dicapai. Citra yang baik dari sebuah lembaga akan menjadi dampak yang menguntungkan bagi lembaga itu. Sebaliknya, apabila citra yang terbangun negatif, maka akan merugikan bagi lembaga tersebut. Citra yang baik dari lembaga pendidikan merupakan asset karena citra mempunyai dampak pada persepsi publik (Ardianto, 2009).

Temuan lain menemukan bahwa sekolah memiliki kendala terkait pelaksanaan manajemen humas yaitu pada kegiatan proses kerjasama dengan berbagai pihak, ada faktor yang menjadi penghambat diantaranya sulitnya sekolah mencari mitra kerjasama yang sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah SMK Perpajakan juga kurangnya biaya operasional untuk menjalankan kerjasama menjadi faktor penghambat jalannya kerjasama dengan IDUK.

Hubungan kerjasama SMK dengan IDUK untuk melaksanakan program-program humas di sekolah. Hal ini sesuai dengan Permen Perindustrian No.03/M-IND/PER/1/2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *link and match* dengan industri. Peraturan menteri ini menjadi pedoman sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi. Kegiatan ini merupakan penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan konsep dasar dari pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). PSG merupakan implikasi dari kebijakan *link and match* pendidikan. Bahwa, pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

D. KESIMPULAN

Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas) di SMK Perpajakan Riau sudah menerapkan 4 fungsi manajemen dimana pada tahap awal perencanaan mereka mengadakan rapat untuk membahas program kerja humas, pada tahap pengorganisasian kepala sekolah berkoordinasi dengan waka humas dan waka humas berkoordinasi dengan kepala i jurusan. Lalu pada tahap pelaksanaan humas SMK Perpajakan merealisasikan program kerja kehumasan. Tahap akhir yaitu pengawasan, pada tahap ini yang paling penting adalah komunikasi. Kendala yang dihadapi humas di SMK Perpajakan Riau adalah 1) Kurangnya partisipasi orang tua, 2) Terbatasnya dana oprasional sekolah, dan 3) Belum siapnya sekolah menghadapi perkembangan zaman untuk proses sinkronisasi kurikulum. Hal tersebut berimplikasi pada kelancaran pelaksanaan kehumasan dan tentu sebagai rekomendasinya sekolah harus segera mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Jika sekolah tidak segera mengantisipasinya maka akan berpengaruh pada image dan mutu sekolah ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. L. (2008). *Teori Dan Profesi Kehumasan Serta aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ardianto, E. (2009). *Public relation praktis*. Bandung:Widya Padjajaran.
- Jaya, H. (2013). Pengembangan laboratorium virtual untuk kegiatan paraktikum dan memfasilitasi pendidikan karakter di SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 2(1), 81–90. <https://doi.org/10.21831/jpv.v2i1.1019>
- Juhji, Nadeak, B., Arifudin, O., Mustafa, M., Choiriyati, W., Hanika, I. M., Tanjung, R., Adiarsi, G. R. (2020). *Manajemen humas pada lembaga pendidikan*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Moloeng, L. J. (2009). *Metodolodi Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rachmat Kriyanto. (2019) *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi, Filsafat dan Etika Serta Perspektif Islam*. Jakarta : Kencana.
- Rahmad, A. (2016). *Manajemen Humas Sekolah*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tohirin. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, M.N. (2019) 'Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto)', *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), pp. 121–139. doi:10.31538/ndh.v4i1.245.
- Satria, R. *et al.* (2019) 'Peningkatan mutu sekolah melalui manajemen hubungan masyarakat', *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(2), pp. 199–207. doi:10.21831/amp.v7i2.26018